

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan keuangan pada pemerintahan daerah di kota kupang tahun 2014-2021, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai analisis kemampuan keuangan daerah pada pemerintahan daerah kota kupang tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2014-2021 didapatkan hasil dengan kriteria kurang, ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja dan pembangunan di Kota Kupang masih kurang.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah kota kupang tahun 2014-2021 didapatkan hasil dengan kriteria sangat tinggi, menggambarkan kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya masih sangat tinggi dan belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah kota kupang tahun 2014-2021 didapatkan hasil dengan kriteria sedang, ini menggambarkan bahwa kinerja masih sedang dengan persentase 20,38% sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.
4. Rasio efektivitas Pendapatan Asli daerah kota kupang tahun 2014-2021 didapatkan hasil dengan kriteria sangat efektif, ini menggambarkan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang di rencanakan sangat.

5.2. Implikasi Teoritis

Berikut ini dijelaskan implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian :

Teori Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, Putra M.M. Sangaji (2021), dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83% termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95%. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48% yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Teori Rycha Kuwara Sari, Choiroel Woestho, Milda Handayani (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemampuan keuangan daerah menunjukkan pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, status kapasitas kemampuan keuangan daerah tinggi didapat oleh Kabupaten Buol, Toli – Toli, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una dan banggai laut.

Sementara pola kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan klasifikasi sedang yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali Utara, sedangkan pola kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan klasifikasi rendah yaitu Kabupaten Sigi